

Penilaian Sumatif Tengah Semester 2

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!

1. Gotong royong sebagai perbuatan bangsa Indonesia mengandung manfaat untuk

a. menumbuhkan sikap individualisme
b. mempererat tali persaudaraan
c. mewujudkan masyarakat yang lebih maju
d. meningkatkan taraf hidup setiap warganya
e. meningkatkan primordialisme

2. Perhatikan pernyataan berikut!

(1) Mempererat rasa kekeluargaan antar-sesama.
(2) Menghindari adanya perbedaan di masyarakat.
(3) Menyelesaikan masalah secara bersama-sama.
(4) Menghilangkan hubungan saling ketergantungan.

Tujuan gotong royong ditunjukkan oleh nomor

a. (1) dan (3)
b. (2) dan (4)
c. (1) dan (2)
d. (2) dan (3)
e. (3) dan (4)

3. Perhatikan pernyataan berikut!

(1) Sikap mementingkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain.
(2) Perkembangan zaman yang menyebabkan masyarakat semakin beragam.
(3) Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia.
(4) Adanya kemajuan di berbagai bidang kehidupan yang menuntut setiap orang untuk menyesuaikan diri.
(5) Berkembangnya sikap materialistis yang selalu menilai segala sesuatu berdasarkan kebendaan (harta dan uang).

Faktor penyebab mudarnya gotong royong di masyarakat ditunjukkan oleh nomor

a. (1), (3), dan (5) d. (2), (4), dan (5)
b. (1), (2), dan (3) e. (3), (4), dan (5)
c. (2), (3), dan (4)

4. Gotong royong dapat membentuk nilai solidaritas dan persatuan di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan gotong royong

a. memperlihatkan kelemahan dan kekurangan setiap orang
b. memperlihatkan kekuasaan dan status sosial setiap orang
c. membuat orang menjadi lebih individualis
d. membuat orang lebih memperhatikan kepentingan pribadi
e. mengajarkan nilai saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama

5. Dalam sebuah desa, masyarakat akan mengadakan acara pembersihan sawah bersama. Kegiatan tersebut seharusnya diikuti oleh
- hanya petani saja
 - hanya warga desa saja
 - petani dan warga desa
 - hanya anggota komunitas saja
 - Dinas Lingkungan Hidup
6. Dampak negatif dari ketidakmampuan untuk berpraktik gotong royong dalam kehidupan sehari-hari adalah
- terbentuknya nilai solidaritas dan persatuan di masyarakat
 - kehilangan kesempatan untuk membantu orang lain
 - membuat orang lain iri dan cemburu
 - membuat kita merasa lebih superior dari orang lain
 - membuat kita tidak peduli dengan kepentingan bersama dan hanya memikirkan kepentingan pribadi
7. Peduli dengan masyarakat sekitar yang sedang merasa kesulitan merupakan jenis gotong royong
- kerja bakti
 - tanggap bencana
 - belajar kelompok
 - musyawarah
 - panen raya
8. Di bawah ini merupakan nilai-nilai gotong royong, **kecuali**
- persatuan
 - kebersamaan
 - primordialisme
 - sosial
 - rela berkorban
9. Setiap daerah di Indonesia memiliki istilah gotong royong berbeda-beda. Di Jawa Barat, masyarakat Sunda menyebut gotong royong dengan istilah
- Ngayah
 - Sabilulungan
 - Sambatan
 - Mapalus
 - Alang Tulung
10. *Perhatikan situasi berikut!*
- Sekelompok masyarakat di suatu daerah memiliki tradisi pada musim panen padi. Masyarakat tersebut melakukan gotong royong untuk menumbuk padi hasil panen secara bergantian. Penyebabnya adalah alat yang mereka gunakan masih bersifat tradisional.
- Berdasarkan situasi tersebut, arti penting kerja sama yang dilakukan masyarakat adalah **HOTS**
- meringankan pekerjaan yang berat dan mempersingkat waktu
 - mencegah terjadinya konflik antarwarga setempat
 - mengurangi biaya yang harus dikeluarkan selama kegiatan berlangsung
 - memperkuat rasa kedaerahan dan kebanggaan terhadap tradisi setempat
 - mempersulit kinerja masyarakat

11. Tradisi dari Toraja yang berupa upacara penghormatan terakhir untuk orang yang sudah meninggal disebut
 - a. Ngayah
 - b. Marsiadapari
 - c. Mapalus
 - d. Alang Tulung
 - e. Rambu Solo'
12. Berikut **tidak** termasuk pada tata kelola pemerintahan yang baik dan diperlukan, yaitu
 - a. pemerintahan yang demokratis
 - b. mewujudkan efisiensi dalam manajemen sektor publik
 - c. terwujudnya akuntabilitas publik
 - d. tersedianya perangkat hukum yang memadai
 - e. adanya sistem informasi yang bebas tanpa aturan
13. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada *stakeholders*. Salah satu praktiknya, yaitu dengan
 - a. pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah
 - b. merencanakan bersama LSM apa yang mau dilakukan di masa mendatang
 - c. menyebarluaskan rencana yang belum pasti untuk diketahui masyarakat
 - d. melaksanakan rencana pembangunan yang belum diajukan kepada DPR
 - e. melaksanakan anggaran tahun yang sebelumnya untuk kegiatan masa depan
14. Berikut yang termasuk tata kelola pemerintahan yang baik dan diperlukan, **kecuali**
 - a. pemerintahan yang demokratis
 - b. adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan
 - c. terwujudnya akuntabilitas publik
 - d. adanya perangkat hukum yang memadai
 - e. adanya sistem informasi yang bebas tanpa aturan
15. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem pembagian kekuasaan negara. Hal tersebut dibuktikan adanya
 - a. lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan hubungan kekuasaan antarlembaga
 - b. adanya sifat sepihak dan searah
 - c. berbagai lembaga kenegaraan
 - d. lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri
 - e. penghapusan DPA sebagai salah satu lembaga negara
16. Lembaga yang bertugas untuk menegakkan peraturan/perundangan-undangan yang berlaku bila terjadi pelanggaran adalah lembaga
 - a. legislatif
 - b. eksekutif
 - c. yudikatif
 - d. konstitutif
 - e. eksaminatif

17. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam Pasal **HOTS**
- a. 20 Ayat (1)
 - b. 20 Ayat (2)
 - c. 20 Ayat (3)
 - d. 20 Ayat (4)
 - e. 20 Ayat (5)
18. Di bawah ini adalah tugas lembaga eksekutif, **kecuali**
- a. membuat atau merancang undang-undang tanpa diajukan kepada badan perwakilan rakyat
 - b. untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri
 - c. memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi
 - d. menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain
 - e. melaksanakan undang-undangan serta perundang-undangan lainnya
19. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR berdasarkan UUD NRI 1945 Amendemen Pasal 11 adalah
- a. menetapkan dan mengesahkan APBN
 - b. menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain
 - c. mengangkat duta dan konsul
 - d. memberi gelar dan tanda jasa
 - e. mengesahkan undang-undang
20. Lembaga penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri adalah
- a. Tentara Nasional Indonesia
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - c. Kejaksaan Agung
 - d. Komisi Pemberantasan Korupsi
 - e. Dewan Perwakilan Rakyat
21. Secara fungsional Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut, **kecuali**
- a. sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan
 - b. melakukan putusan atau sengketa kewenangan antarlembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar
 - c. melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia
 - d. mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan
 - e. memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum apabila hal tersebut diminta oleh pemerintah

22. *Perhatikan pernyataan berikut!*

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, terlibat dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Konstitusi berperan dalam pemilihan hakim konstitusi.

Berdasarkan pada pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa **HOTS**

- a. lembaga negara pusat terbiasa bekerja sama dalam melakukan suatu pekerjaan
- b. sistem ketatanegaraan Indonesia hanya dikuasai oleh Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. lembaga-lembaga negara di Indonesia tidak mampu mengerjakan pekerjaan secara mandiri
- d. legislatif, eksekutif, yudikatif merupakan satu kesatuan dalam sistem pemerintahan
- e. setiap lembaga negara tidak perlu bekerja sama dalam menjalankan tugas

23. *Pahami tugas-tugas Presiden berikut!*

- (1) Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
 - (2) Mengajukan RUU kepada DPR.
 - (3) Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang.
 - (4) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA.
- Dari data di atas yang merupakan tugas Presiden dalam bidang eksekutif ditunjukkan pada nomor

- a. (1) dan (2)
- b. (1) dan (3)
- c. (1) dan (4)
- d. (2) dan (4)
- e. (3) dan (4)

24. Pejabat administrasi negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam mengambil keputusan. Jika beberapa orang dalam situasi dan kondisi hukum yang sama mengajukan suatu permohonan, mereka harus mendapatkan keputusan tanpa dikenai syarat-syarat tambahan yang subjektif, merupakan penerapan **HOTS**

- a. kepastian hukum
- b. kesamaan
- c. keseimbangan
- d. perlakuan yang jujur
- e. larangan penyalahgunaan wewenang

25. X sebuah lembaga negara. Kedudukan X berada di ibu kota negara (Jakarta). X harus menyelenggarakan sidang sedikitnya sekali dalam lima tahun. Salah satu kewenangan lembaga X adalah melantik Presiden. X adalah **HOTS**

- a. Dewan Perwakilan Rakyat
- b. Dewan Pertimbangan Agung
- c. Badan Pemeriksa Keuangan
- d. Majelis Permusyawaratan Rakyat
- e. Dewan Perwakilan Daerah

1. Jelaskan yang Anda ketahui tentang tradisi Ngayah!

5. Jelaskan yang dimaksud dengan pertahanan menurut UU No. 3 Tahun 2002!